BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah satunya diperparah dengan rendahnya penerapan *corporate governance.* Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik.

Pengelolaan perusahaan *(corporate governance)* dalam dunia ekonomi, merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan Negara. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan peranan dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita.

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Ketidakmampuan sektor swasta didalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak debitur luar negeri disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan yang disebabkan karena lemahnya peraturan dan perundangan yang mengatur sistem pengelolaan perusahaan di Indonesia. Pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di kalangan perusahaan di Indonesia terjadi karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris maupun direksi, serta *stakeholders* lainnya, sehingga kontrol akan kinerja perusahaan menjadi sangat longgar.

Dengan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG tersebut tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis risiko atau hasil, investasi yang berlebihan pada saat yang tidak produktif yang pada akhirnya menurunkan atau pudarnya kepercayaan para pemodal.

Menurut Bapak Gunawan salah satu pegawai di bagian Personalia dan Umum mengatakan permasalahan yang dihadapi Jamsostek yaitu kurang optimalnya pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam prinsip transparansi, diidentifikasikan masih ada sekitar 1173 perusahaan yang belum mendaftar di Jamsostek. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kepada mengenai syarat-syarat Perusahaan Wajib Daftar (PWD) di Jamsostek. Efek dari permasalahan tersebut koordinasi tidak berjalan dengan baik, seharusnya target 1173 Perusahaan Wajib Daftar (PWD) segera terealisir malah menjadi terhambat.

Dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka pelaksanaan praktik *Good Corporate Governnace* yaitu prinsip transparansi belum terlaksana

dengan optimal di Jamsostek. Kunjungan fungsional mengenai sosialisasi persyaratan Perusahaan Wajib Daftar (PWD) pada Jamsostek harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini.

Selanjutnya Bapak Gunawan mengatakan pula bahwa persyaratan Perusahaan Wajib Daftar (PWD) di Jamsostek adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan tersebut sudah memiliki lebih dari 2 (dua) orang tenaga kerja.
2. Perusahaan tersebut sudah memberlakukan gaji pegawai sesuai Upah Minimum Kuota (UMK).

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja, maka perusahaan harus berpedoman pada pengelolaan yang diterapkan secara taat azas *(consisten)*, sehingga semua nilai yang dimilki pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu akan memudahkan penelitian arah pengembangan dan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan secara baik.

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menerapkan etika dan transparan. *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan

secara lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha.

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi *(transparency)*, kemandirian *(independency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, dan kewajaran *(fairness)*. Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip GCG. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut, tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis risiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya menurun kepercayaan pemodal.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya *corporate governance*, sesuai dengan *Forum for Coporate Governance in Indonesian* (FCGI) (2001;4), antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders.*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value.*

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Gagasan pelaksanaan GCG di Indonesia merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan. Dengan GCG, diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai kaidah praktik yang sehat di segala bidang.

Tata kelola perusahaan yang baik memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan dari para investor dapat memberi peluang akses sumber pendanaan yang murah dan berkembangnya pasar modal, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional, memberi peluang akses kredit dengan bunga yang kompetitif, serta sebagai kontrol yang efektif dalam mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap perusahaan di Indonesia sudah seharusnya menerapkan prinsip GCG dan manfaatnya mulai terasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul "**Analisa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Jamsostek Kantor Cabang I Bandung.**"

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Kinerja Jamsostek pada pelaksanaan praktik GCG dalam prinsip transparansi masih belum optimal yaitu kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan Perusahaan Wajib Daftar (PWD) di Jamsostek.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan.
2. Bagaimana manfaat pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan.

1.3.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperlukan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap perusahaan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* di perusahaan.
2. Untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

   Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akutansi keuangan, terutama mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Bagi Peneliti lain

   Dapat memberikan tambahan informasi bagi penulis lain yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

3. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai analisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta sebagai bahan pembanding antar teori yang didapat dalam bangku kuliah dengan pelaksanaan dilapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam mengambil keputusan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Bagi Pegawai

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi peningkatan kinerja perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Jamsostek Kantor Cabang I Bandung yang berlokasi di Jl. PHH. Mustofa No.39 Bandung.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2010.

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan					
		Februari 2010	Maret 2010	April 2010	Mei 2010	Juni 2010	Juli 2010
1	**Tahap Persiapan :**						
	1.Membuat proposal tugas akhir						
	2.Menentukan tempat penelitian						
2	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1.Mengajukan proposal tugas akhir						
	2.Penelitian di PT. Jamsostek Bandung I						
	3.Bimbingan tugas akhir						
3	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft tugas akhir						
	2.Sidang tugas akhir						
	3.Penyempurnaan tugas akhir						
	4.Penggandaan tugas akhir						